



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 803 -Hukum/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu indikator untuk mengukur pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 16);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PPH-LT.01.01-21 Tanggal 8 Mei 2023 Hal Pembentukan Tim Kerja dan Asesor Indeks Reformasi Hukum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variable penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 10 Agustus 2023

 BUPATI CIREBON 

 IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variable penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 10 Agustus 2023



Tembusan:

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 803-HUKUM/2023

TANGGAL : 10 Agustus 2023

TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

Ketua : GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, SH., MH

Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. UMAR MAULANA, SH., MH

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon

2. ANGGIE SHARASWATI, SH

Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

3. NOEROEL DJANNATI, SH

Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

4. RIRIN RIYANTINI, SH

Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon

5. HENDRIK PRASETYO, SH

Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon

JUDUL	:	
Sekretariat	: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
ASISTEN		
ASISTEN		

 BUPATI CIREBON, 

 IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.803-Hukum/2023

TANGGAL : 10 Agustus 2023

TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

Ketua : GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, SH., MH

Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. UMAR MAULANA, SH., MH

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon

2. ANGGIE SHARASWATI, SH

Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

3. NOEROEL DJANNATI, SH

Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

4. RIRIN RIYANTINI, SH

Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon

5. HENDRIK PRASETYO, SH

Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon

Sekretariat : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.803-Hukum/2023

TANGGAL : 10Agustus 2023

TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI MANDIRI (TIM KERJA) INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

Ketua : GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, SH., MH

Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. UMAR MAULANA, SH., MH

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon

2. ANGGIE SHARASWATI, SH

Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

3. NOEROEL DJANNATI, SH

Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

4. RIRIN RIYANTINI, SH

Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon

5. HENDRIK PRASETYO, SH

Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon

Sekretariat : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax.321025
Website : www.cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 3 Agustus 2023
Nomor : 100.3.3.2/ 210 / Hukum
Sifat : Penting
Lampiran : - N/3/
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG HARIAJI, SH.,MPA.
NIP. 19771122 200501 1 006

Tembusan:
Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.